

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Agama, negara dan masyarakat merupakan suatu kesatuan yang saling mengikat satu sama lain. Peranan agama dalam masyarakat di suatu negara sangat diperlukan untuk keselamatan masyarakat dan negaranya. Indonesia adalah negara demokratis, yang mayoritas penduduknya pemeluk agama Islam. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama kepada semua orang, masing-masing menurut agama atau keyakinan sendiri. Konstitusi ini juga menetapkan bahwa negara Indonesia harus didasarkan pada keyakinan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Ibnu Khaldun terbentuknya negara adalah karena kekuatan pada suku dan rasa golongan. Rasa golongan atau *ashabiyah* itu mempunyai sifat-sifat dan bentuk-bentuknya yang tersendiri sesuai dengan keadaan mereka yang menguasainya. Agamapun mempunyai pengaruh dalam penguatan negara. Jika pertikaian terjadi di kalangan penguasa, maka negara pun lemah, cepat hancur dan musnah.¹

Musthāfa Kemal al-Tattūrک juga memiliki pemikiran tersendiri mengenai hubungan antara agama dan negara. Menurutnya, agama dan negara memiliki relevansi, namun dalam pengelolaan urusan agama dan negara harus terpisah. Oleh karena itu, ia telah menjadikan negara Turki sebagai negara sekuler yang memisahkan urusan dunia dengan urusan agama.²

Akan tetapi pada realitasnya, agama, negara dan masyarakat sering terjadi konflik, hal ini dikarenakan pemahaman dan sudut pandang yang berbeda dan salah tafsir. Indonesia sebagai sebuah negara yang rakyatnya memiliki semangat beragama yang tinggi, seringkali digoyang tidak hanya oleh gelombang pasar global, melainkan juga oleh konflik solidaritas dan loyalitas keagamaan yang

¹ Osman Raliby, *Masyarakat dan Negara*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 45

² Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cet. X; (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 54

melampaui sentimen nasionalisme dan kemanusiaan. Namun adakalanya orang lebih membela kelompok agamanya meski berada di luar negaranya. Atau orang lebih loyal pada kelompok atau partai yang mengusung simbol agama ketimbang pada cita-cita berbangsa dan bernegara serta kemanusiaan.

Berkaitan dengan hubungan agama dan negara bagi Ibnu Khaldun dalam suatu negara agama tetap menduduki posisi penting sebagai kebenaran yang harus diwujudkan pada realitas. Agama merupakan landasan pembangunan suatu negara dan kerajaan. Ia merupakan kekuatan pemersatu dan sumber legitimasi kekuatan politik yang membuat negara tak terkalahkan. Tanpa agama, negara memiliki dasar pijakan pada kenyataan yang berbeda. Agama dan negara adalah dua kesatuan sejarah yang berbeda hakikatnya, agama adalah kabar gembira dan peringatan. Sedangkan negara adalah kekuatan pemaksa. Agama mempunyai khatib, juru dakwah dan ulama, sedangkan negara memiliki birokrasi, pengadilan dan tentara. Agama dapat mempengaruhi jalannya sejarah melalui kesadaran bersama. Negara mempengaruhi sejarah dengan keputusan, kekuasaan dan perang. Agama adalah kekuatan dari dalam dan negara adalah kekuatan dari luar.³

Dalam praktik kehidupan kenegaraan masa kini, hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yakni *integrated* (penyatuan antara agama dan negara), *intersectional* (persinggungan antara agama dan negara), dan sekularistik (pemisahan antara agama dan negara). Bentuk hubungan antara agama dan negara di negara-negara Barat dianggap sudah selesai dengan sekularismenya atau pemisahan antara agama dan negara. Paham ini menurut *The Encyclopedia of Religion* adalah sebuah ideologi, dimana para pendukungnya dengan sadar mengecam segala bentuk supernaturalisme dan lembaga yang dikhususkan untuk itu, dengan mendukung prinsip-prinsip non-agama atau anti-agama sebagai dasar bagi moralitas pribadi dan organisasi sosial.⁴

Pemisahan agama dan negara tersebut memerlukan proses yang disebut sekularisasi, yang pengertiannya cukup bervariasi, termasuk pengertian yang sudah

³ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 21

⁴ *The Encyclopedia of Religion*, Vol. 13, (New York: Macmillan Publishing Company), h.

ditinjau kembali. Menurut Peter L. Berger berarti “sebuah proses dimana sektor-sektor kehidupan dalam masyarakat dan budaya dilepaskan dari dominasi lembaga-lembaga dan simbol-simbol keagamaan”.⁵ Proses sekularisasi yang berimplikasi pada marjinalisasi agama ini bisa berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, yang terutama dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan sejarah masing-masing masyarakatnya.

Namun dalam kenyataannya, umat Islam tetap memperhatikan faktor agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meski negara itu telah melakukan modernisasi dan sekularisasi politik bersamaan dengan proses globalisasi. Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari karakteristik ajaran Islam itu sendiri, yang tidak hanya merupakan sistem teologis, tetapi juga cara hidup yang berisi standar etika moral dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat dan negara. Islam tidak membedakan sepenuhnya antara hal-hal sakral dan profan, sehingga Muslim yang taat menolak pemisahan antara agama dan negara.

Indonesia menjadi contoh paling gamblang tentang pengaruh agama dalam kehidupan negara bangsa. Bahkan menurut Parig Digan (1977) menelaah Indonesia tanpa melibatkan unsur agama di dalamnya tidak akan menemukan hasil yang komprehensif. Hal ini tidak terlepas dari peran agama yang berlangsung cukup lama dalam pembentukan negara bangsa Indonesia. Sejak sebelum kemerdekaan kehadiran organisasi keagamaan (Islam) begitu tertoreh terang dalam catatan sejarah Indonesia, mulai dari Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya merupakan bukti yang tidak mungkin dilepaskan dari kehidupan negara bangsa Indonesia.⁶

Dengan demikian, baik dalam konsep sistem ketatanegaraan maupun realitas pada saat ini hubungan antara agama dan negara di Indonesia tetap dalam bentuk yang kedua (*intersectional*) atau hubungan persinggungan antara agama dan

⁵ Lihat Gergely Rosta, “*Secularization or Desecularization in the Work of Peter Berger, and the Changing Religiosity of Europe*”, dalam <http://www.crvp.org/book/Series07/VII-26/chapter-14.htm>.

⁶ A. Bakir Ihsan dan Cucu Cahyati, *Agama, Negara, Dan Masyarakat: Tokoh Agama Di Tengah Politik Identitas Warga Kota* (Jakarta: HAJA Mandiri bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020), h. 1-2

negara, yang berarti tidak sepenuhnya terintegrasi dan tidak pula sepenuhnya terpisah. Dalam hubungan semacam ini terdapat aspek-aspek keagamaan yang masuk dalam negara dan ada pula aspek-aspek kenegaraan yang masuk dalam atau memerlukan legitimasi agama.

Keterlibatan agama dalam merespon berbagai masalah kehidupan sosial semakin jelas dan signifikan, termasuk dalam menempatkan hubungan yang memungkinkan antara Islam dan negara. Karena masalah ini seringkali menjadi problem yang bersifat mendasar. Oleh karenanya tidaklah mengherankan kalau pemikiran tentang Islam dan negara ini sudah menjadi diskusi dan perdebatan ulama sejak tempo dulu. Mendiskusikan Islam dan politik di Indonesia melibatkan kekhawatiran dan harapan lama yang mencekam. Daerah ini penuh dengan ranjau kepekaan dan kerawanan.⁷

Pemikiran politik tentang hubungan agama dan negara telah menjadi persoalan yang paling banyak diminati oleh masyarakat Muslim, terutama pada abad 19 hingga abad 21. Wacana hubungan agama dan negara selalu menjadi hal yang menarik bagi para pemikir politik Islam. Agama Islam oleh pemeluknya diyakini akan dapat menyelesaikan berbagai masalah, baik yang bersifat mental spiritual maupun fisik material. Oleh karena itu, agama selalu dilibatkan oleh para pemeluknya untuk merespon berbagai masalah aktual yang dihadapinya, sehingga kehadiran agama secara fungsional dapat dirasakan.

Secara global di dunia Islam terdapat tiga aliran tentang hubungan Islam dan ketatanegaraan: Pertama, aliran pertama berpendapat bahwa Islam adalah agama yang lengkap, yang mencakup pengaturan bagi semua aspek manusia termasuk ketatanegaraan. Kedua, aliran kedua ini berpendapat bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, Islam tidak ada hubungannya dengan ketatanegaraan karena Nabi Muhammad SAW bukanlah sebagai kepala negara melainkan hanya seorang utusan Allah SWT. Ketiga, aliran ketiga ini ini menolak Islam sebagai agama yang lengkap, namun juga menolak pendapat bahwa Islam tidak ada

⁷ Abdul Kohar, *Politik dan Islam di Indonesia*, (Jurnal Tapis Vol. 14 No.01 Januari - Juni 2017

hubungan sama sekali dengan ketatanegaraan, aliran ini mengatakan bahwa dalam Islam terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.⁸

Dari segi gerakan politik, hubungan antara agama dan negara di Indonesia mengalami perkembangan dalam bentuk oposisi, alienasi dan integrasi. Tiga tipologi gerakan agama tersebut telah mengalami dinamika yang progresif dan silih berganti. Islam sebagai agama memainkan peran politik oposisi terhadap pemerintahan Majapahit, sejak awal berdirinya Kerajaan Islam Demak. Sedangkan pada masa pemerintahan kerajaan Islam Demak, Islam dan politik kenegaraan terbangun secara terintegrasi, tetapi ketika pusat kekuasaan Islam beralih kepada kerajaan Mataram, maka tipologi hubungan Islam tidak mengambil pola integrasi sebagaimana praktik kerajaan Islam Demak, tetapi kerajaan Mataram Islam mengambil model moderat yang berkarakter sinkretis. Peran raja sebagai simbol keagamaan cukup hadir dua kali selama setahun, walaupun kesehariannya tidak datang ke Masjid.⁹ Sementara itu, kekuatan politik agama mengambil peran oposisi yang ketat ketika Belanda datang menjajah Nusantara. Para ulama dan da'i berjuang melawan kekuatan kolonial Belanda dengan membentuk organisasi-organisasi keagamaan.

Tak dapat dipungkiri, ulama dan santri memegang posisi penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya rela mengorbankan waktu dan tenaga, tak sedikit santri dan ulama yang mengorbankan darah dan nyawa saat berjihad di medan perang. Sebelum melancarkan aksi perlawanan, ulama adalah salah satu gaung terkuat dalam menggemakan keinginan masyarakat Indonesia meraih kemerdekaan. Tak sedikit ulama yang diasingkan bahkan sengaja dibuang oleh penjajah karena dianggap sebagai ancaman terbesar penjajah dalam menguasai Indonesia.

Namun bagai pepatah mati satu tumbuh seribu, semangat para ulama dalam menyiarkan agama sekaligus menanamkan jiwa nasionalisme terus berkembang

⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 1.

⁹ Sofyan Hadi, "Relasi dan Reposisi Agama dan Negara: Tatapan Masa Depan Keberagamaan di Indonesia", *Jurnal Millah* Vol. X, No 2, Februari 2011, h. 228-229.

kepada santri didikannya. Tak sedikit santri yang meneruskan perjuangan gurunya untuk menyiarkan Islam ke berbagai penjuru bangsa. Makna jihad fi sabilillah bagi mereka bukanlah sekedar teori yang hanya perlu mereka pahami maknanya, tapi merupakan sebuah prinsip kehidupan yang mereka genggam hingga titik darah penghabisan.

Meskipun kini, jasad para ulama dan santri-santrinya telah berguguran di medan perang, namun jasa dan ilmu yang mereka berikan kepada para penerusnya akan terus terjaga hingga kini. Bahkan, meski kini jasad mereka telah tertanam di dasar bumi dan menyatu dengan tanah, namun takzim dan pahala para ulama terus mengalir bagai sumber mata air yang tak pernah kering meski di tengah musim kemarau. Seperti janji Allah yang tertuang dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, bahwa Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan juga orang yang dikaruniai ilmu pengetahuan hingga beberapa derajat.

Pendidikan Islam mempunyai sejarah yang panjang. Dalam pengertian seluas-luasnya, pendidikan Islam berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri. Dalam konteks masyarakat Arab, di mana Islam lahir dan pertama kali berkembang, kedatangan Islam lengkap dengan usaha-usaha pendidikan – untuk tidak menyebut sistem – merupakan transformasi besar. Sebab, masyarakat Arab pra-Islam pada dasarnya tidak mempunyai sistem pendidikan formal.¹⁰

Sejak berabad-abad lalu, saat Indonesia masih di bawah belenggu penjajahan, banyak putra bangsa Indonesia yang menempuh jarak ribuan kilometer demi memperoleh ilmu agama. Mereka rela terapung di samudera berhari-hari bahkan berbulan-bulan demi menuntut ilmu kepada syaikh di Makkah, Madinah, dan Mesir untuk nantinya mereka sebarkan di Indonesia.

Menuntut ilmu di negeri sendiri, saat itu bukan perkara mudah. Hanya anak-anak dari kalangan bangsawan dan pejabat yang diperbolehkan mengenyam pendidikan, sedangkan anak-anak dari keluarga sederhana harus berpuas hati meski

¹⁰ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos, 1999), h. vii.

hanya dapat menghabiskan waktu di sawah atau ladang sambil membantu orang tua mereka.

Salah satu kisah perjuangan ulama dalam menyiarkan ilmu agama juga terdapat di Bekasi. Wilayah yang saat itu masih di dominasi hutan jati dan sengon itu memiliki beberapa ulama termasyur, K.H. Noer Alie adalah salah satunya. Kiai Noer Alie adalah seorang ulama yang juga mendapat gelar pahlawan Nasional pada 10 November 2006 lalu. Ketokohan Kiai Noer Ali telah diakui oleh dunia internasional dan nasional. Bahkan dia dijuluki sebagai *Singa Karawang-Bekasi* atau 'Macan' Bekasi karena perjuangannya mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah.

Selain dikenal sebagai pejuang dan ahli strategi perang KH. Noer Ali juga dikenal sebagai pencetus pendidikan agama di Bekasi, Jawa Barat. Sudah tak terhitung berapa santri lulus dari pesantren yang didirikan sejak zaman perjuangan sebelum kemerdekaan itu. Pemikiran KH. Noer Ali, memang gamblang dan relevan terhadap perkembangan masyarakat Bekasi yang kala itu masih di bawah rata-rata. Peran tuan tanah sangat berpengaruh dengan kondisi pendidikan masyarakat setelah kemerdekaan.

Dalam bidang sosial dan pendidikan, KH. Noer Ali membentuk sebuah organisasi bernama Pembangunan Pemeliharaan dan Pertolongan Islam yang kemudian berganti nama menjadi Yayasan Attaqwa. Yayasan ini merupakan induk pendidikan Sekolah Rakyat Indonesia (SRI), pesantren dan kegiatan pemberdayaan umat Islam lainnya.

Pola pendidikan yang didirikan oleh KH. Noer ali adalah tidak meninggalkan tradisi pesantren dan konsep Islam tradisi keislaman sufi. Kurikulum yang ditetapkan pada lembaga pendidikan memfokuskan pelatihan pembacaan Al-Quran. Manajemen kurikulumnya selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan santri yang belajar. Sistem kurikulum dibagi dan sesuai dengan jenjang pendidikan, di antaranya taman kanak-kanak, sekolah dasar, pendidikan menengah, Pendidikan tinggi dan pendidikan non formal.

Metode pengajaran yang dikenal dengan *Thariqah Jadidah fi ta'lim al-'arabiyyah*, Memasukkan kurikulum pendidikan formal, gagasan ini dibuat oleh

KH Ma'ali Syamsudin dan disetujui oleh KH Noer Ali. Berikut beberapa metode pengajaran yang diterapkan dalam pendidikannya, antara lain: metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode penjelasan, metode cara belajar siswa aktif, metode menghafal, metode keteladanan, metode bil hal (tindakan), metode bil lisan (pelatihan berbicara di depan umum atau *public speaking*), metode bil qalam (pelatihan menulis yang dipublikasikan).

Membahas mengenai posisi pendidikan dalam pembelajaran, KH. Noer Ali mengatakan bahwa pendidik mengajarkan kebaikan pada santrinya. Guru adalah sosok cerminan bagi peserta didiknya. Seorang pelajar (peserta didik) haruslah menyucikan hatinya dari perbuatan buruk, tujuannya adalah hati yang ada pada dirinya pantas dijadikan tempat ilmu. Hati yang bersih akan mudah untuk melakukan hal-hal yang baik, begitu pula sebaliknya jika hatinya masih ada perasaan dan perbuatan buruk akan sulit untuk berbuat baik sekaligus sulit untuk menerima ilmu yang disampaikan. Kemudian, peserta didik juga memiliki adab terhadap gurunya, seperti sifat tawadlu' dan menghormati guru.

Selain pendidikan formal dan non formal yang diterapkan dan diselenggarakan oleh sekolah, KH Noer Alie juga memiliki gagasan bahwa masyarakat yang disekitarnya harus mengenyam pendidikan bela negara. Tujuannya ialah mendidik masyarakat untuk membela negara sesuai dengan profesinya, dan sebagai manusia turut serta membangun dan memajukan bangsa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis sangat tertarik sekali untuk meneliti tentang permasalahan agama, masyarakat dan negara yang di cetuskan oleh KH. Noer Alie dalam bentuk pendidikan. KH. Noer Alie sebagai pahlawan bangsa juga merupakan tokoh pendidikan dalam dunia ilmu pendidikan formal (sekolah) dan non formal (pesantren). Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan ini dalam sebuah disertasi yang berjudul "AGAMA DAN PENGUATAN CIVIL SOCIETY (Studi Tentang Peran K.H. Noer Alie Terhadap Pengembangan Pemberdayaan Umat di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas tentang AGAMA DAN PENGUATAN CIVIL SOCIETY (Studi Tentang Peran K.H. Noer Alie Terhadap Pengembangan Pemberdayaan Umat di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat), maka permasalahan ini dapat dirumuskan dalam beberapa rumusan, antara lain:

1. Bagaimanakah peranan KH. Noer Alie dalam Pengembangan Pemberdayaan Umat di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimanakah faktor pendukung dan penghambat KH. Noer Alie dalam Pengembangan Pemberdayaan Umat di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana relevansi antara agama, negara dan penguatan civil society dalam Pengembangan Pemberdayaan Umat di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat yang digagas KH. Noer Ali?
4. Bagaimanakah upaya KH. Noer Ali dalam Pengembangan Pemberdayaan Umat di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi peranan KH. Noer Alie dalam Pengembangan Pemberdayaan Umat di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat KH. Noer Alie dalam Pengembangan Pemberdayaan Umat di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk menganalisis dan relevansi antara agama, negara dan penguatan civil society dalam Pengembangan Pemberdayaan Umat di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat yang digagas KH. Noer Ali.
4. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi upaya KH. Noer Ali dalam Pengembangan Pemberdayaan Umat di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoretis

- 1) Hasil penelitian ini sebagai pengembangan khazanah keilmuan, bagi peneliti sendiri, khususnya dalam bidang studi agama-agama.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan dalam bidang akademik, mahasiswa jurusan studi agama-agama.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian tentang agama, Negara dan masyarakat hubungannya dengan Pengembangan Pemberdayaan Umat.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi:

- 1) Pesantren. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia pesantren sebagai lembaga pendidikan non formal tapi sangat dibutuhkan dan tetap eksis di masyarakat sebagai pemersatu bangsa.
- 2) Pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah dalam menghargai peran Kiyai dan santri dalam membela tanah air, sehingga dapat mengambil kebijakan dalam mengembangkan dunia pendidikan keagamaan.
- 3) Para Pendidik. Penelitian ini diharapkan sebagai motivasi dan semangat juang bagi para pendidik untuk terus berjuang dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa pamrih, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh KH. Noer Alie.
- 4) Masyarakat. Penelitian ini diharapkan sebagai pengetahuan bagi masyarakat dan pemahaman tentang agama, Negara dalam kiprahnya di dunia pendidikan baik formal ataupun non-formal.

E. Kerangka Berfikir

Kajian tentang pemahaman agama, negara dan penguatan civil society yang berkaitan dengan peranan KH. Noer Alie dalam Pengembangan Pemberdayaan Umat, pada dasarnya sangat menarik untuk didiskusikan. Dalam konteks agama dan negara, fenomena sekarang yang terjadi di Negara Indonesia banyak sekali kasus konflik agama yang terjadi di Indonesia dikarenakan salah persepsi dan salah tafsir serta salah pemahaman. Banyak sekali isu-isu sara dengan membawa isu-isu agama dalam masyarakat untuk memecah belah ummat. Oleh karena itu penting sekali bagaimana pemahaman tentang relasi agama, negara dan penguatan civil society supaya seiring dan sejalan, karena agama, negara dan masyarakat saling membutuhkan dan menguatkan.

Dengan demikian kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga landasan teori yaitu teori utama yang bersifat universal (*grand theory*), teori penengah (*middle theory*) yang berfungsi menjelaskan masalah penelitian; penjelasan paradigma objek yang diteliti, dan aplikatif teori (*apply theory*) untuk menjelaskan operasionalisasi teori dalam masalah yang menjadi objek penelitian sehingga jelaslah karakteristik objek yang diteliti tersebut. Untuk lebih jelasnya maka akan penulis uraikan lebih lanjut di bawah ini :

1. Teori Relasi Antara Agama dan Negara (*Grand Theory*)

Pengertian agama dalam masyarakat Indonesia selain dari kata agama, dikenal pula kata *din* dari bahasa Arab dan kata *religi* dari bahasa Eropa. Agama berasal dari kata Sanskrit. Satu pendapat mengatakan bahwa kata itu tersusun dari dua kata, *a* = tidak dan *gam* = pergi, jadi tidak pergi. Selanjutnya, *Din* dalam bahasa Semit berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan.¹¹

Adapun kata *Religi* berasal dari bahasa Latin. Menurut satu pendapat asalnya ialah *relegere* yang mengandung arti mengumpulkan, membaca. Agama memang merupakan kumpulan cara-cara mengabdikan kepada Tuhan. Ini terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca. Tetapi menurut pendapat lain, kata itu berasal dari kata

¹¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI-Press, 1985), h. 9.

religare yang berarti mengikat. Ajaran-ajaran agama memang mempunyai sifat mengikat bagi manusia. Dalam agama selanjutnya terdapat pula ikatan antara roh manusia dengan Tuhan, dan agama lebih lanjut lagi memang mengikat manusia dengan Tuhan.¹² Menurut Cicero, relegere berarti melakukan suatu perbuatan dengan penuh penderitaan, yakni jenis laku peribadatan yang dikerjakan berulang-ulang dan tetap. Lactancius mengartikan kata relegere sebagai mengikat menjadi satu dalam suatu persatuan bersama.¹³

Sedangkan pengertian agama dari segi istilah dapat dikemukakan sebagai berikut. Elizabeth K. Nottingham dalam bukunya *Agama dan Masyarakat* berpendapat bahwa agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaannya sendiri dan keberadaan alam semesta.¹⁴

Pengertian agama yang dibangun kaum sosiolog tersebut bertolak dari das sein, yakni agama yang dipraktikkan dalam kenyataan empirik yang terlihat, dan bukan berangkat dari aspek das sollen, yakni agama yang seharusnya dipraktikkan dan secara normatif teologis sudah pasti baik adanya. Agama dalam kenyataan empirik ini bisa jadi berbeda dengan agama yang terdapat pada aspek batinnya yang bersifat substantif.¹⁵

Di Persia misalnya ada agama zoroaster. Agama ini disandarkan pada pendirinya Zarathustra (w.583 SM.). Selanjutnya terdapat nama agama Budha yang dinisbahkan kepada tokoh pendirinya Sidharta Gautama Budha (lahir 560 SM.). Demikian pula nama agama Yahudi yang disandarkan kepada orang-orang Yahudi (Jews), asal nama dari negara Juda (Judea) atau Yahuda.¹⁶

Dan masyarakat Islam membentuk suatu kehidupan, atau perkumpulan, atau persukuan. Dari persukuan inilah manusia mempunyai keinginan bersama membentuk suatu wadah atau lembaga, atau negara untuk mencapai cita-cita kehidupan yang lebih sejahtera. Sebab tanpa kebersamaan manusia tidak mampu hidup sendiri.

¹² Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, h. 10

¹³ Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), h. 7.

¹⁴ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 10.

¹⁵ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 11

¹⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 64.

Sebab dari itu, di dalam kitab suci al-Qur'an ada kata-kata balad yang disebut sampai sembilan kali, kata-kata bilad disebut lima kali, dan kata-kata baldah disebut lima kali, bahkan lebih menarik lagi, adanya suatu surat yang bernama balad, surat kesembilan puluh mengisahkan kota makkah. Kata-kata balad itu diterjemahkan dengan negeri, daerah, wilayah, yang menjadi salah satu unsur berdirinya suatu negara.¹⁷

Gagasan tentang negara adalah setua usia manusia, karena gagasan ini telah ditemukan sejak manusia sebagai makhluk sosial. Lebih tepatnya, sejak manusia merupakan “zoon politicon”, makhluk berpolitik. Sebagai makhluk berpolitik dalam diri manusia, maka telah tertanam niat dan hasrat manusia untuk berorganisasi.¹⁸ Lebih dari itu, negara juga merupakan wadah atau medium untuk memajukan peradaban manusia. Dan tak dapat dipungkiri, dengan kehadiran negara dapat menciptakan tata sosial yang kondusif bagi pengembangan manusia menuju peradaban manusia.¹⁹

Pengertian negara secara literal istilah merupakan terjemahan dari kata asing, yakni state (bahasa Inggris), staat (bahasa Belanda dan Jerman) dan etat (bahasa Prancis). Kata staat, state, etat itu diambil dari kata bahasa Latin status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Kata status atau statum lazim diartikan sebagai standing atau station (kedudukan).²⁰

Pengertian negara secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat,²¹ yang bercita-cita menegakkan hak dan keadilan bagi segenap rakyat,

¹⁷ Sjechul Hadi Poernomo, *Islam dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV Aulia, 2004), h. 1

¹⁸ Sjechul Hadi Poernomo, *Islam dalam Lintasan Sejarah*, h. 2

¹⁹ Sjechul Hadi Poernomo, *Islam dalam Lintasan Sejarah*, h. 3

²⁰ Dede Rosyada, dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, 2000), h. 41.

²¹ Dede Rosyada, dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education)*, h. 42

serta berusaha untuk memudahkan jalan mencari penghidupan dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian.²²

Sedang pengertian negara menurut para pakar :

- a. Logemann bahwa negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat. Organisasi itu sesuatu pertambahan jabatan-jabatan atau lapangan-lapangan kerja.²³
- b. Roger H. Soltau bahwa negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama, atas nama masyarakat.
- c. Max Weber bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
- d. Robert M. Maclever bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.²⁴
- e. Georger Jellinek bahwa negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.
- f. George Wilhelm Friedrich Hegel bahwa negara adalah merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.²⁵

Islam memberikan pandangan dunia dan makna hidup bagi manusia termasuk bidang politik. Dari sudut pandangan ini maka pada dasarnya dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama (din) dan politik (dawlah). Argumentasi ini sering dikaitkan dengan posisi Nabi Muhammad ketika berada di Madinah yang

²² Mushthafa As Sibawayh, *Agama dan Negara Study Perbandingan Antara Yahudi-Kristen-Islam*, (Surabaya: Asia Afrika, 1978), h. 4.

²³ Solly Lubis, *Ilmu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 1.

²⁴ Hendarmin Ranadireksa, *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik*, (Bandung: Fokus Media, 2007), h. 25.

²⁵ Budiyanto, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*, (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 2.

membangun sistem pemerintahan dalam sebuah negara kota (city-state). Di Madinah Rasulullah berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala agama.²⁶ Di samping itu, negara Islam merupakan negara teokrasi, negara yang diperintahkan oleh Tuhan. Negara Islam di sisi lain juga bersifat monarkis, atau oligarkis dengan kekuasaan yang diserahkan kepada satu atau beberapa orang. Negara Islam juga merupakan monarki universal, di mana adalah juga sebagai bentuk pemerintahan berdasar hukum.²⁷ Al-Qur'an sebagai undang-undang dasar negara Islam tidak pernah berubah dan tidak akan berubah.²⁸

Dalam sejarah peradaban manusia, agama dan negara adalah dua institusi yang sama-sama kuat berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia. Tidak jarang demi agama, seseorang tidak keberatan mengorbankan jiwa dan raganya. Demikian pula, tidak jarang demi negara, seseorang tidak keberatan mengorbankan jiwa dan raganya. Konsep syahid dalam Islam dan konsep pahlawan yang berkaitan dengan negara adalah cerminan dari betapa dua institusi tersebut sama-sama mempunyai pengaruh yang demikian besar terhadap kehidupan umat manusia.²⁹ Al-Qur'an menyatakan: *Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa,* (Q.S. al- Nuur:55).

Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kebutuhan manusia akan negara didasarkan pada akal dan hadis. Argumen rasionalnya terletak pada kebutuhan universal semua manusia untuk bergabung, bekerja sama dan menikmati berbagai manfaat kepemimpinan tanpa peduli apakah mereka menganut suatu agama atau tidak. Argumen rasional itu juga diperkuat dengan landasan dari Sunnah Nabi dan hadis. Ia mengajukan sejumlah Sunnah atau hadis Nabi yang menekankan perlunya kepemimpinan dan pemerintahan. Contoh sabda Nabi sebagai berikut : “Bila ada tiga orang melakukan perjalanan, maka salah seorang di antara mereka selayaknya

²⁶ Dede Rosyada et al, *Pendidikan Kewargaan*, h. 61.

²⁷ Sjechul Hadi Poermono, *Islam Dalam Lintasan*, h. 93.

²⁸ A. Hasjmy, *Di mana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), h. 54.

²⁹ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 21.

menjadi pimpinan,” dan juga sabda Nabi yang kedua, “Enam puluh tahun berada di bawah tirani lebih baik daripada satu malam tanpa pemerintahan.”

Dari kedua hadis itu Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa praktek pengukuhan sebuah pemerintahan harus dianggap sebagai sarana agar manusia lebih berkesempatan mendekati diri kepada Allah. Memang, istilah negara (daulah) tidak disinggung di dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah, tetapi unsur-unsur esensial yang menjadi dasar negara dapat ditemukan dalam kitab suci al-Qur’an.³⁰ Lebih lanjut Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa negara dan agama “sungguh saling berkelindan; tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya. Tanpa disiplin hukum wahyu, negara pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik.³¹ Hal ini diperkuat oleh konsepsi Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa, syari’ah adalah untuk kebaikan manusia dan memenuhi kepentingan masyarakat. Orisinalitas wahyu berpotensi menjembatani kemauan mereka untuk menerima dan taat terhadapnya, serta berfungsi sebagai perekat yang menyatukan masyarakat luas.³²

Sejalan dengan pendapat di atas, Fazlur Rahman seorang tokoh Neomodernisme Islam, juga membenarkan bahwa masyarakat Madinah yang diorganisir Nabi itu merupakan suatu negara dan pemerintahan yang membawa kepada terbentuknya suatu umat muslim.³³ Pendapat ini diperkuat oleh Ahmad Syafii Maarif, apa yang dituangkan dalam Piagam Madinah adalah penjabaran dari prinsip-prinsip kemasyarakatan yang diajarkan al-Qur’an sekalipun wahyu belum lagi rampung diturunkan.³⁴

Tujuan utama dari sebuah pemerintahan Islam adalah untuk membentuk sebuah masyarakat Islam. Oleh karena itu, sebuah masyarakat Islam, secara definitif adalah sebuah masyarakat yang ideal di mana tertib sosial telah dibentuk dan diatur

³⁰ Khalid Ibrahim lindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 46.

³¹ Khalid Ibrahim lindan, *Teori Politik Islam*, h. 47

³² M. Umer Chapra, *Peradaban Muslim Penyebab Keruntuhan & Perlunya Reformasi*, diterjemahkan oleh Ikhwan A. Basri, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 31.

³³ J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Di Tinjau Dari Pandangan al-Qur’an*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), h. 2.

³⁴ J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan*, h. 3

sesuai dengan nilai-nilai Islam, ajaran-ajaran, dan aturan-aturannya.³⁵ Sebuah pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang menerima dan mengakui otoritas absolut dari Islam. Ia berupaya untuk membentuk sebuah tertib sosial yang Islami sesuai dengan ajaran yang terkandung di dalam Islam.³⁶ Di jelaskan secara baik oleh al-Ghazali dalam *Ihya'Ulum al-din*, bahwa sesungguhnya dunia adalah ladang akhirat. Agama tidak akan sempurna kecuali dengan dunia. Negara dan agama adalah dua anak kembar. Agama adalah batang. Dan sultan adalah pemeliharanya. Sesuatu yang tak berbatang akan tumbang. Sesuatu yang tanpa pemelihara, juga akan sia-sia. Negara dan peraturannya tidak akan terselenggara, kecuali melalui kekuasaan sultan.

2. Teori Agama dan Perubahan Sosial (*Midle Theory*)

Istilah adaptabilitas berkaitan dengan perubahan-perubahan sosial. Suatu perubahan dapat diketahui jika ada sebuah penelitian dari susunan kehidupan masyarakat pada suatu waktu dengan kehidupan masyarakat pada masa lampau. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, lapisan-lapisan dalam masyarakat dan sebagainya. Banyak penyebab perubahan, antara lain yaitu: ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan penggunaannya oleh masyarakat, komunikasi, transportasi, urbanisasi, yang semua ini mempengaruhi dan mempunyai akibat terhadap masyarakat yaitu perubahan masyarakat melalui kejutan dan karenanya terjadilah perubahan sosial.³⁷

Moore (1967) mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi pada struktur-struktur sosial, yakni pada pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan. Dapat dikatakan kalau konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan: (1) perbedaan, (2) pada waktu berbeda, dan (3) diantara keadaan sistem sosial yang sama.³⁸

³⁵ Ahmad Vaezi, *Agama Politik, diterjemahkan oleh Ali Syahab*, (Jakarta: Citra, 2006), h. 10.

³⁶ Ahmad Vaezi, *Agama Politik, diterjemahkan oleh Ali Syahab*, h. 11

³⁷ Ishomudin, *Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 91

³⁸ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media. 2004), h. 3

Sebagai suatu pedoman, maka dapat dirumuskan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.³⁹

Agama dan perubahan memang merupakan dua hal yang berbeda, tapi saling mempengaruhi. Agama seringkali dianggap sebagai pandangan hidup yang di nomor duakan karena ajarannya banyak membahas kehidupan setelah mati. Namun, tak dapat dipungkiri, kesadaran keagamaan tidak hanya berkenaan dengan ritual ketuhanan dan menggapai keselamatan akhirat. Namun, agama juga menjadi rujukan dalam menyelesaikan problem hidup di dunia. Sejarah telah mencatat bahwa agama juga menempatkan dirinya sebagai penggerak perubahan masyarakat seperti yang telah ditulis oleh Weber mengenai agama Protestan dan Bellah tentang agama Tokugawa.

Fenomena perubahan sosial dewasa ini menggambarkan dan menjelaskan kepada kita bahwa agama menjadi salah satu faktor perubahan sosial itu sendiri. Agama sebagai hasil kebudayaan, yang ada, hidup dan berkembang dalam masyarakat memiliki peranan penting dalam perubahan sosial tersebut. Dalam hal ini, menggagas pemikiran tentang hubungan antara agama dan perubahan sosial bertitik-tolak dari pengandaian bahwa perubahan sosial merupakan suatu fakta yang sedang berlangsung, yang diakibatkan oleh kekuatan-kekuatan yang sebagian besar berada di luar kontrol kita, bahwa tidak ada kemungkinan sedikitpun untuk menghentikannya. Di sini, disposisi agama, pada satu sisi dapat menjadi penentang, sebagaimana tercermin dalam ucapan Marx bahwa agama adalah candu bagi rakyat. Menurutnya, karena ajaran agamalah maka rakyat menerima saja nasib buruk mereka dan tidak tergerak untuk berbuat sesuatu untuk memperbaiki keadaan.

Agama pada sisi lain dapat menjadi pendorong adanya perubahan sosial. Agama, sampai batas tertentu, dapat dikatakan hidup sehingga masyarakat secara

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003), h. 100-101

actual mengenali acuan-acuan transenden dari sistem signifikasi atau lambang keagamaan sebagai sesuatu yang benar dengan sendirinya.⁴⁰

Dengan adanya perubahan sosial, agama diharapkan tidak melakukan tindakan ekstrim dengan memasang tembok tebal penolakan datangnya perubahan sosial dengan selalu mengacu pada keadaan-keadaan tradisional tempo dulu. Agama diharapkan mampu mengkontekstualisasikan dirinya, mempersiapkan umatnya untuk mempengaruhi arah perubahan sosial dengan memperkuat struktur-struktur yang ada, agar bisa menyaring pengaruh negatif dari perubahan-perubahan sosial itu. Agama harus melakukan fungsinya menenangkan umatnya menghadapi situasi ini dengan jalan mempertajam kesadaran umatnya, bukan justru sebaliknya menarik garis ekstrim atau melegalisir dan mendorong umatnya melakukan tindakan-tindakan anarkis sebagai wujud kefrustasian atas keadaan.

Agama memiliki nilai-nilai bagi kehidupan manusia sebagai per orang maupun dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, agama juga memberi dampak bagi kehidupan sehari-hari. Karena agama mempunyai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu, maka dari itu para pengikut agama dalam menentukan sikapnya dalam hal menerima atau menolak perubahan dengan berpatokan kepada nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam agama tersebut. Penjelasan di atas merupakan salah satu fungsi agama sebagai nilai etik, karena dalam melakukan suatu tindakan, seseorang akan terikat pada ketentuan antara mana yang boleh dilakukan dan mana yang dilarang sesuai dengan ajaran agamanya.⁴¹

Agama sebagai kausal variabel secara sederhana mengandung pengertian sebagai sebab musabab terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat. Sebab, apabila kehadiran agama di tengah-tengah hingar bingar akselerasi kehidupan manusia tidak dapat menawarkan semangat perubahan, maka eksistensi agama akan menjadi pudar. Dengan kata lain, kalau sudah demikian, tidak mustahil agama akan ditinggalkan oleh umatnya dan boleh jadi belakangan menjadi gulung tikar karena

⁴⁰ Abu Bakar A. Bacader, *Islam dalam Perpektif Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996), h. 46

⁴¹ Ishomudin, *Pengantar Sosiologi Agama*, h. 37

dianggap sudah tidak up to date. Oleh karena itu, para pemuka agama atau bahkan pengikut agama secara individual melakukan pemikiran ulang atau yang lebih kita kenal dengan istilah ijtihad terhadap suatu hal yang telah tercantum dalam dalil-dalil agama. Dari situ, agama akan menentukan, menerima atau menolak perubahan. Hal itu juga dilakukan agar agama tetap eksis di tengah perubahan dan memunculkan sifat-sifatnya yang adaptif. Tanpa itu, dapat dipastikan semakin lama sesuai dengan tuntutan zaman, agama akan ditinggalkan oleh pemeluknya dan pada akhirnya gulung tikar. Meskipun acap kali tidak mudah untuk mensosialisasikan agama sebagai bagian dari spirit proses perubahan sosial.

Memang tidak selamanya perubahan yang diakibatkan sepak terjang agama dapat berdampak kemajuan peradaban bagi manusia. Tidak sedikit perubahan yang mengarah pada kemunduran (regress) sebuah peradaban bangsa tertentu seperti terjadi konflik-konflik yang mengatasnamakan agama. Sedangkan perubahan yang mengarah pada kemajuan (progress) peradaban manusia, posisi agama pun memberikan kontribusi yang sangat besar. Dengan agama, manusia dapat menebarkan perdamaian dan cinta kasih di antara sesama, optimis dalam menatap masa depan, menciptakan alat-alat teknologi untuk peningkatan kesejahteraan, menegakkan keadilan, sekaligus pemihakan terhadap golongan lemah yang menyebabkan stabilitas sosial. Namun di sisi lain, agama tidak hanya menjamin stabilitas sosial, tetapi kadang-kadang juga mendukung konservatisme yang ekstrim.⁴²

Wacana agama dan perubahan sosial saat ini menjadi penggalan pendek sejarah peradaban. Hubungan tersebut dibangun dari rumusan pertanyaan dan ragam argumentasi mengenai letak agama dalam perubahan sosial. Merujuk pada Max Weber (1864-1920), agama-lah yang berjasa melahirkan perubahan sosial yang paling spektakuler dalam sejarah peradaban manusia. Dengan nilai-nilai keagamaan mendorong penganutnya untuk melakukan perubahan sosial dalam rangka melahirkan peradaban yang lebih humanis. Dalam bukunya yang berjudul *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, Weber mengemukakan bahwa aspek-

⁴² Elizabeth K. Nattingham, *Agama dan Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1975), h 133

aspek tertentu dalam etika Protestan merupakan perangsang yang kuat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kapitalis dalam tahap-tahap pembentukannya.⁴³

Menurut penelitian Max Weber dalam bukunya tersebut, ia menyatakan bahwa Protestanisme yang diusung oleh Martin Luther dan Johannes Calvin sesungguhnya telah berhasil mengubah wajah Eropa dengan etika Kristen. Kehidupan gereja menurut penelitian Max Weber sebelum peristiwa Reformasi abad XVI sebenarnya telah mengembangkan sikap asketisme yang terarah ke luar-dunia, yaitu kehidupan yang mengarah ke sorga. Sehingga orang-orang yang bekerja secara sekuler dianggap belum memiliki tingkat rohani yang mulia.

Orang-orang yang tertarik pada ajaran Calvin seringkali berasal dari orang-orang kota dan kelompok pedagang yang mulai berhasil di dunia, dan yang berpengaruh dalam masalah-masalah politik keagamaan.⁴⁴ Kepercayaan Calvinis tidak hanya dengan amat tegas menekankan perlunya kerja keras dan melarang semua bentuk pemborosan dan penggunaan uang dengan percuma, tetapi ia juga menolak validitas sistem gerejawi untuk mendapatkan kehidupan yang baik di bumi ini dan di sorga kelak melalui pemberian sakramen.⁴⁵

Pelaksanaan sistem sakramen yang seharusnya dibenarkan sejak dahulu hingga sekarang merupakan inti ajaran Katolik. Namun, doktrin Calvinis mengatakan bahwa hanya Tuhanlah yang mengetahui siapa yang selamat dan siapa yang terkutuk selama-lamanya. Baik usaha individual maupun rahmat sakramen tidak dapat mengubah ketentuan-ketentuannya yang telah ditetapkan. Konsep Calvinis tentang Tuhan menekankan pada aspek-aspek transendennya, memandangnya sebagai Yang Maha Tahu, Penguasa alam semesta, dan Pemberi keadilan dan malapetaka. Sementara orang Kristen di abad pertengahan, dalam pandangannya tentang dunia yang akan datang, terutama memperhatikan pencapaian sorga. Dan mereka juga menyandarkan diri pada pertolongan Kristus, Perawan Maria, dan orang-orang suci serta keseluruhan system sakramen gereja.

⁴³ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi dan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1986), h. 238

⁴⁴ Elizabeth K. Nattingham, *Agama dan Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1975), h 135

⁴⁵ Elizabeth K. Nattingham, *Agama dan Masyarakat*, h. 137

Pengikut-pengikut Calvin dihantui oleh ketakutan terhadap neraka yang siap menyergap dan ketakutan untuk menghadapi nasibnya dengan hanya satu Tuhan yang transenden dan menakutkan itu.

Sementara di dunia politik, pengikut Calvin siap melakukan perlawanan secara moral dan secara fisik melawan penguasa-penguasa dunia yang jahat dan mengancam mereka turun dari jabatannya. Pada saat awal gerakan revolusioner ini, John Knox, seorang pengikut Calvin di Scotlandia, menentang kekuasaan-kekuasaan wanita kejam.⁴⁶ Atas kecamannya itulah Ratu Maria dari Skotlandia berhasil digulingkan. Belanda yang aktivitas perdagangan dan keuangannya yang besar melambangkan semangat masa baru di bawah pimpinan penguasa-penguasa Calvinis. Dengan bantuan Inggris puritan, para Calvinis berhasil menentang depotisme-depotisme kolot dari Spanyol dan Prancis. Sementara itu, anggota-anggota parlemen di Inggris yang beraliran Calvinis, menentang pemerintahan yang zalim dari raja-raja Stuart. Mereka juga memberikan pembenaran-pembenaran keagamaan terhadap ajaran-ajaran politik radikal di mana mereka mengantisipasi teori-teori demokratik masa depan yang ekstrim.

Tak kalah dengan Weber dengan Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, Robert N. Bellah juga melakukan pengamatan terhadap agama Tokugawa dengan pembangunan ekonomi Jepang. Penelitian ini menguji seberapa besar pengaruh agama Tokugawa terhadap cepatnya laju pembangunan di Jepang. Bellah berusaha menemukan factor-faktor yang menunjang keberhasilan Jepang menjadi masyarakat industri modern. Jepang merupakan satu-satunya bangsa non Barat yang mampu dengan cepat mentransformasikan dirinya menjadi Negara industri, yaitu suatu masyarakat yang mempunyai peranan ekonomi yang sangat penting dalam sistem sosialnya, dan peranan penting nilai-nilai ekonomi dalam sistem nilainya. Bellah mengembangkan teori Weber dalam kajian fungsional dalam sistem sosial dengan mencoba melihat prestasi dan bawaan dengan sifat-sifat ekonomi yang disebut sebagai nilai ekonomis. Kemudian sistem motivasi atau

⁴⁶ Wanita-wanita kejam yang dimaksud Knox dalam selebarannya yang berjudul *The First Blast of The Trumpet against The Monstrous Regiment of Women* adalah Ratu Maria dari Inggris, Maria dari Guise, penguasa Prancis, dan Ratu Maria dari Skotlandia. Mereka semua orang-orang Katolik Romawi.

budaya sebagai nilai-nilai budaya dan politik sebagai nilai-nilai politik, serta sistem integratif atau institusi sebagai nilai-nilai integratif dijadikan sebagai unsur yang universal dan partikular untuk melihat pola utama.⁴⁷ Awal gerak gelombang industrialisasi Jepang berawal dari kelas samurai. Kelas samurai inilah yang memiliki wiraswastawan unggul dan sanggup membangun kembali masa kejayaan kekaisaran Jepang, dan meletakkan dasar-dasar modernisasi Jepang.

Bellah membuat dua klasifikasi dalam pengamatan ini. Pertama, banyaknya agama di Jepang tidak menghalangi Bellah menganalisis dan mengkategorikan agama-agama di Jepang sebagai suatu entitas. Karena pengikut agama-agama tersebut bercampur baur sehingga sulit dibedakan satu sama lain secara rinci. Kedua, agama-agama di Jepang sanggup membentuk nilai-nilai dasar masyarakat Jepang. Dilihat dari sejarahnya, agama-agama di Jepang berawal dari etika pejuang-pejuang samurai yang kemudian baru dikenal masyarakat secara luas setelah melalui pengaruh agama Konfusianisme dan Budhisme dan kemudian menjadi panutan etika penduduk Jepang secara keseluruhan. Dari dua klasifikasi tersebut, Bellah melihat tiga kemungkinan keterkaitan agama dan ekonomi Jepang.⁴⁸ Pertama, agama mempengaruhi secara langsung etika ekonomi. Kedua, pengaruh agama terhadap ekonomi terjadi melalui pranata politik. Ketiga, pengaruh agama terjadi melalui pranata keluarga.

Demikian juga saat Islam hadir di Jazirah Arab pada abad ke-7 masehi. Muhammad yang hadir sebagai pemimpin baru di Makkah, selain mengemban misi tauhid, ia juga melakukan perbaikan moral, yang dimana waktu itu di Makkah mengalami jaman jahiliyah atau jaman kebodohan. Ajaran Islam membawa pesan dan ajaran tentang hak-hak orang miskin, melindungi perempuan, dan membela hak-hak budak yang tertindas. Bahkan setelah Muhammad hijrah ke Madinah, Muhammad mampu membentuk masyarakat madani dengan adanya Piagam Madinah. Dengan Piagam Madinah, Muhammad membuat tatanan masyarakat baru

⁴⁷ Robert N. Bellah, *Religi Tokugawa Akar-akar Budaya Jepang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 5

⁴⁸ Ishomudin, *Pengantar Sosiologi Agama*, h. 59

lintas suku dan kabilah dalam satu negara yang dibangun atas dasar kebersamaan dan keadilan.⁴⁹

Umat Islam pada saat ini berada dalam situasi yang kritis. Pada masa orde baru, umat Islam mengalami kemunduran. Peran umat Islam semakin marginal. Peranan lembaga keagamaan yang kurang memiliki relevansi dengan cita-cita pembangunan semakin tersudutkan dengan adanya pembangunan yang berorientasi pada ekonomi dan stabilitas.

Seiring dengan perubahan sosial akibat proses modernisasi, sebagian ilmuwan meyakini bahwa agama akan mengalami penurunan di segala bidang kehidupan. Fenomena ini dikenal sebagai proses sekularisasi. Kata sekuler dan sekularisasi berasal dari Barat (Inggris, Belanda, dan lain-lain).⁵⁰

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Sekular artinya bersifat duniawi kebendaan (bukan bersifat keagamaan atau kerohanian).⁵¹ Kata sekuler yang di adopsi dari kata latin *Seaculum*, pada mulanya berarti masa atau generasi dan juga memiliki arti konotasi rangkap ditandai dengan waktu yang tepat.

3. Teori Peran (*Aplied Theory*)

Istilah kata “peran” (role) dalam kamus *Oxford Dictionary* diartikan: *Actor’s part; one’s task of function* yang berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi.⁵² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran (1) pemain sandiwara (film): peran utama; (2) tukang lawak pada permainan makyong; (3) perangkat tingkah yg diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁵³ Dari penjelasan tersebut secara sederhana peran dapat diartikan sebagai bagian yang dimainkan oleh seseorang pemain dalam sandiwara atau film.

Menurut Soerjono Soekamto, peran merupakan tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dan merupakan pembentuk

⁴⁹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-jeram Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 94-95

⁵⁰ Nurholis Madjid, *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 216

⁵¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 894

⁵² http://repository.radenintan.ac.id/251/3/Bab_II.pdf diunduh pada tanggal 10 Agustus 2022

⁵³ Ananda Santoso, *Kamus Besar Praktis Bahasa Indonesia: Untuk Pelajar dan Umum*, (Surabaya: Dara Publika, 2000), h. 251.

tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat.⁵⁴ Pendapat ini mengarah kepada sesuatu yang seharusnya dilakukan individu/seseorang di dalam suatu masyarakat karena dia memiliki kedudukan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu di dalam masyarakat. Jadi apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan sedang menjalankan suatu peran.

Kyai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kyai adalah seseorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figure, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.⁵⁵

Ciri yang paling penting bagi sebuah lembaga pendidikan pesantren adalah adanya seorang Kyai.⁵⁶ Suatu lembaga pendidikan Islam disebut pesantren apabila memiliki tokoh sentral yang disebut Kyai. Pada umumnya, sosok Kyai sangat berpengaruh, kharismatik, dan berwibawa sehingga sangat disegani oleh masyarakat di lingkungan pondok pesantren. Selain itu, biasanya Kyai pondok pesantren adalah sekaligus sebagai pengagas dan pendiri dari pesantren tersebut. Dengan demikian, sangat wajar apabila dalam pertumbuhannya, pesantren sangat tergantung pada peran seorang Kyai.⁵⁷

Kuatnya otoritas Kyai di pesantren, maka mati hidupnya pesantren banyak ditentukan oleh figur Kyai. Sebab bagaimanapun Kyai merupakan penguasa, baik dalam pengertian fisik maupun nonfisik yang bertanggungjawab penuh terhadap lembaga pesantren.

Adapun peran Kyai menurut Mardiah dalam sebuah pesantren adalah sebagai berikut:

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 9.

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, hal. 3

⁵⁶ Kyai merupakan sebuah gelar yang lebih ditujukan kepada seseorang yang memiliki pengetahuan agama Islam secara mendalam, sekaligus memiliki lembaga pendidikan pesantren.

⁵⁷ Marjani Alwi, *Pondok Pesantren: Ciri Khas, Perkembangan, dan Sistem Pendidikannya*, h. 207.

a. Kyai sebagai Visioner

Kyai diakui sebagai pemimpin memiliki ciri yang memperlihatkan visi, kemampuan, dan keahlian serta tindakan yang lebih mendahulukan kepentingan organisasi dan kepentingan orang lain (masyarakat) daripada kepentingan pribadi. Kyai sebagai pemimpin pesantren diakui mampu mendefinisikan, mengkomunikasikan dan mengartikulasikan kedisiplinan visi organisasi, serta bawahan harus menerima dan mengakui kredibilitas pemimpinnya.

b. Kyai sebagai Komunikator

Kyai sebagai pimpinan pesantren selalu berupaya mempengaruhi bawahannya melalui komunikasi langsung dengan menekankan pentingnya nilai-nilai, asumsi-asumsi, komitmen dan keyakinan, serta memiliki tekad untuk mencapai tujuan dengan senantiasa mempertimbangkan akibat-akibat moral dan etik dari setiap keputusan yang dibuat. Ia memperlihatkan kepercayaan pada cita-cita, keyakinan, dan nilai-nilai hidupnya. Dampaknya adalah dikagumi, dipercaya, dihargai, dan bawahan berusaha mengidentikkan diri dengannya. Hal ini disebabkan perilaku yang memomorsatukan kebutuhan bawahan dan menghindari penggunaan kuasa untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian bawahan bertekad dan termotivasi untuk mengoptimalkan usaha dan bekerja ke tujuan bersama.

c. Kyai sebagai Motivator

Kyai sebagai pemimpin pesantren bertindak dengan cara memotivasi dan memberikan inspirasi kepada bawahan melalui pemberian arti dan tantangan terhadap tugas bawahan. Bawahan diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara optimal dalam hal gagasan-gagasan, memberi visi mengenai keadaan organisasi masa depan yang menjanjikan harapan yang jelas dan transparan. Pengaruhnya diharapkan dapat meningkatkan semangat kelompok, antusiasisme, dan optimisme dikobarkan sehingga harapan-harapan itu menjadi penting dan bernilai bagi mereka dan perlu direalisasikan melalui komitmen yang tinggi, dan dapat membentuk iklim kerja komunitas pesantren sebagai bentuk pemberdayaan diri, seperti kerjasama tim yang saling mendukung.

d. Kyai sebagai Inovator

Kyai sebagai pimpinan pesantren mendorong bawahan untuk memikirkan kembali cara kerja dan mencari cara-cara kerja baru dalam menyelesaikan tugasnya. Pengaruh yang diharapkan, bawahan merasa pimpinan menerima dan mendukung mereka untuk memikirkan cara-cara kerja mereka, mencari cara-cara baru dalam menyelesaikan tugas, dan merasa menemukan cara-cara kerja baru dalam mempercepat tugas-tugas mereka.

e. Kyai sebagai Edukator

Pimpinan memberikan perhatian pribadi kepada bawahannya, seperti memperlakukan mereka sebagai pribadi yang utuh dan menghargai sikap peduli mereka terhadap organisasi misalnya merasa diperhatikan dan diperlakukan manusiawi dari atasannya. Adanya bentuk penghargaan pimpinan kepada komunitas pesantren yang mempunyai kepedulian terhadap pesantren, seperti adanya program peningkatan kualitas pendidikan dan adanya peningkatan kesejahteraan hidup. Bimbingan dan perhatian yang diberikan oleh para pemimpin sangat besar kepada para guru dan santri yang menjadi pengurus organisasi atau unit usaha, bahkan kepercayaan diberikan apabila para pengurus tersebut menunjukkan loyalitas, kesungguhan dan keseriusan pengabdianya.⁵⁸

Kiai sebagai gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik Islam kepada para santrinya.⁵⁹ Kiai panggung adalah para dai. Mereka menyebarkan dan mengembangkan Islam melalui kegiatan dakwah, kebanyakan kiai panggung bersifat lokal, dalam arti hanya dikenal oleh umat islam didaerahnya saja.⁶⁰

Predikat kiai senantiasa berhubungan dengan suatu gelar yang menekankan kemuliaan dan pengakuan yang diberikan secara sukarela kepada ulama dan pemimpin masyarakat setempat sebagai sebuah tanda kehormatan bagi kehidupan

⁵⁸ Mardiyah, *Kepemimpinan Kyai dalam Memelihara Budaya Organisasi*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2012), h. 54-61.

⁵⁹ Jasa Ungguh Muliawan, *Ilmu Pendidikan Islam (Studi Kasus Terhadap Struktur Ilmu, Kurikulum, Metodologi, dan Kelembagaan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 300

⁶⁰ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2004), h. 34.

sosial dan bukan merupakan suatu gelar akademik yang diperoleh melalui pendidikan formal.⁶¹ Kiai bukanlah sekedar sumber pengetahuan agama, melainkan juga pembimbing spiritual yang tanpa pertolongannya akan hidup dalam kesesatan.⁶² Seorang kiai mendapatkan kedudukan yang teramat penting, baik di internal pesantren maupun di tengah-tengah masyarakatnya, sehingga dianggap sebagai pusat solidaritas, keterlibatan dalam masyarakat sehari-hari menghasilkan suatu pola komunikasi dan pola relasi yang begitu akrab.

Selain berperan sebagai pendidik dan pembimbing masyarakat, kiai juga terlibat langsung dengan apa saja yang menjadi suka duka masyarakatnya, seperti kelahiran, akad dan pesta pernikahan, atau ketika ada masyarakat yang meninggal dunia.⁶³ Kriteria seorang kiai yaitu sebagai panutan, bijak, dan menguasai ilmu spiritual dan sebagai pemimpin dan membimbing masyarakat.

Kriteria seorang da'i (seorang pendakwah) yaitu seorang da'i harus mempunyai persiapan-persiapan yang matang baik dari segi keilmuan maupun dari segi budi pekerti. Da'i profesional yang mengkhususkan diri di bidang dakwah seyogianya memiliki kepribadian yang baik untuk menunjang keberhasilan dakwah. Sosok da'i yang memiliki kepribadian sangat tinggi dan tak pernah kering digali adalah pribadi Rasulullah SAW.

Bagi setiap da'i hendaklah menjadikan Alquran sebagai pedoman untuk dapat mengali nilai-nilai keluhuran dan kebajikan sehingga tingkah laku dan perkataannya merupakan cerminan dari nilai-nilai illahiah tersebut. Di samping itu seorang da'i hendaklah mengambil pelajaran dari Rasulullah dan para sahabat serta para ulama saleh terdahulu yang telah berjuang menegakkan nilai-nilai luhur yang ada dalam ajaran Islam. Seorang da'i memiliki kriteria-kriteria kepribadian yang dipandang positif oleh ajaran Islam dan masyarakat. dan juga seorang da'i tidak membimbing di masyarakat hanya menyampaikan materi dakwah, mampu menguasai alquran dan hadist.

⁶¹ Endang, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, h. 33

⁶² Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat Kiai Pesantren-Kiai langgar di Jawa*, (Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cermelang, 2013), h. 174

⁶³ Halim Soebahar, *Modernisasi pesantren studi transformasi kepemimpinan kiai dan sistem pendidikan pesantren*, (Yogyakarta, PT.LkiS Printing Cermelang, 2013), h. 71

Masyarakat dapat memiliki arti luas dan sempit. Dalam arti luas masyarakat adalah keseluruhan hubungan dalam hidup bersama dan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa, dan sebagainya. Dalam arti sempit yang dimaksud masyarakat adalah hubungan sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu.⁶⁴

Masyarakat terbentuk sebagai wujud ketergantungan individu terhadap orang lain, karena manusia memang makhluk sosial. Masyarakat sebagai objek dakwah atau sasaran dakwah. Masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil sedangkan Rinton mengemukakan bahwa yang dimaksud masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya, berpikir tentang dirinya dalam suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.⁶⁵

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang utuh, terdiri dari beberapa individu yang hidup disuatu wilayah atau daerah tertentu. Masyarakat sebagai objek dakwah atau sasaran dakwah adalah salah satu unsur yang penting dalam sistem dakwah.⁶⁶ Masyarakat religius adalah bersifat religi dan bersifat keagamaan yang bersangkutan paut dengan religi. Imam ar-Razi mendefinisikan agama sebagai sekumpulan peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang untuk mengikutinya sesuai pilihan sendiri guna mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Agama merupakan sistem kepercayaan dan doktrin spiritual terhadap realitas tertinggi yang sering disebut sebagai *Universal Rite*.⁶⁷

Religiusitas dengan istilah keberagamaan yang diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia baik itu menyangkut perilaku ritual atau beribadah maupun

⁶⁴ Faizah& Lalu Muchsin Effeni, *Psikologi Dakwah*, (Jakarta: PT. Adhitya Adrebina Agung, 2006), h. 74

⁶⁵ Faizah& Lalu Muchsin Effeni, *Psikologi Dakwah*, h. 73-74

⁶⁶ Faizah& Lalu Muchsin Effeni, *Psikologi Dakwah*, h. 73 dan 80.

⁶⁷ Abdul Jalil, *Spiritual Entrepreneurship Transformasi Spirituallitas Kewirausahaan*, (Yogyakarta : LkiS Yogyakarta, 2013), h. 36

aktivitas lain dalam kehidupan yang diwarnai oleh nuansa agama baik yang tampak dan dapat dilihat atau yang tidak tampak atau yang terjadi di dalam hati manusia.⁶⁸

Jadi yang dimaksud masyarakat religius adalah suatu masyarakat yang di dalamnya tertanam nilai-nilai agama yang melekat pada setiap gerak tindak perilaku warganya, ditambah dengan simbol-simbol yang substansial keagamaan yang melekat pada setiap kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya serta dihiasi dengan perilaku yang terpuji atau akhlakul karimah.

Ciri-ciri pribadi yang religius yaitu mereka yang keimanannya kuat dan berakhlakul karimah, ditandai dengan sifat yang bersabar, ikhlas, adil, tekun, amanah. Dan dengan beribadah yang tekun, menjalankan sholat lima waktu tanpa menunda-nunda, juga mempunyai berakhlak mulia. Pribadi yang religius harus mampu mencakup tiga hal yaitu keimanan, beribadah, dan berbuat baik (akhlakul karimah).

Menurut Ancok salah satu kenyataan yang terjadi dalam sepanjang perjalanan sejarah umat manusia adalah fenomena keberagamaan (*religiosity*). Untuk menerangkan fenomena ini secara ilmiah, bermunculanlah beberapa konsep religiusitas. Salah satu konsep yang akhir-akhir ini dianut banyak ahli Psikologi dan Sosiologi adalah konsep religiusitas rumusan C.Y Glock & R. Strak.⁶⁹

Hubungan kiai dengan masyarakatnya diikat dengan emosi keagamaan yang membuat kekuasaan sahnya semakin berpengaruh. Kharisma yang menyertai aksi-aksi kiai juga menjadikan hubungan itu penuh dengan emosi. Karena kiai telah menjadi penolong bagi para penduduk dalam memecahkan masalah mereka, yang tidak hanya terbatas pada masalah spiritual tetapi juga mencakup aspek kehidupan yang lebih luas.⁷⁰

Masyarakat Jawa dikenal secara luas mengakui adanya perbedaan-perbedaan antara pribadi-pribadi di dalam status sosial mereka, dan ini telah menjadi norma yang mengatur hubungan sosial di kalangan orang Jawa, meskipun perbedaan-perbedaan dalam status sosial sebenarnya rumit dan tumpang tindih, namun

⁶⁸ Djamaludin Ancok, Fuat Nasori, *Psikologi Islami Solusi Atas Problem-Problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 76

⁶⁹ Djamaludin Ancok, Fuat Nasori, *Psikologi Islami*, h. 76

⁷⁰ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, h. 97

kehidupan sosial orang Jawa ditandai oleh berjalannya norma-norma yang membeda-bedakan antara yang tua dan yang muda, yang kaya dan yang miskin, dan seterusnya. Bahkan, sejak usia dini, orang Jawa telah diperkenalkan dengan norma-norma tersebut. Sistem norma itu pun bekerja secara efisien, khususnya di daerah-daerah perdesaan.⁷¹

Hubungan antar kiai dan masyarakat mirip dengan antar ulama atau orang suci dalam masyarakat dunia Islam lain, kemiripan ini mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa umat Islam sama-sama menerima konsep dan pengalaman keagamaan yang menciptakan gaya kepemimpinan yang sama.⁷²

Hubungan antar kiai dengan masyarakat religius sangat erat sekali hubungannya, kiai di desa selalu berperan sebagai panutan oleh semua orang yang ada di desa, kiai juga mampu menyelesaikan masalah masyarakat dengan memberikan solusi yang diterima oleh masyarakat. Masyarakat suatu desa sudah dikatakan religius bila masyarakat sudah menjadi masyarakat yang berakhlakul karimah dan menjadi pribadi yang lebih baik.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Agama dan Penguatan Civil Society tentunya sudah banyak diteliti oleh peneliti lain. Akan tetapi penelitian tentang Agama dan Penguatan Civil Society dalam kaitannya dengan peran KH. Noer Alie belum ada yang meneliti. Untuk membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka penulis akan mendeskripsikan beberapa penelitian yang terdahulu antara lain:

1. Supardi Dwimaputra, dengan judul “*Agama Dan Negara: Pemikiran Sjafruddin Prawiranegara (1911-1989)*”. Disertasi mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2020.

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa: Pertama, Sjafruddin adalah seorang yang fanatis terhadap syariat Islam, Seorang tokoh nasionalis-religius dan moderat dalam memandang realitas kehidupan, yang mampu menjadikan nilai-nilai

⁷¹ Endang, Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, h. 94.

⁷² Endang Turmudi, *Perselingkuhan kiai dan kekuasaan*, h. 98.

agama sebagai prinsip kehidupan. Kedua, dalam hal agama dan negara, Syafruddin berpendapat bahwa agama dan negara bersifat integralistik dan tidak bisa dipisahkan satu-sama lain. Agama dan negara saling menopang satu sama lainnya. Negara yang agamis itu adalah negara yang menerapkan Demokrasi berketuhanan. Ketiga, Islam dan Pancasila dalam pandangan Syafruddin adalah, Pancasila bukanlah agama, akan tetapi suatu falsafah atau theory, oleh karena Pancasila sebatas falsafah bangsa, theory atau gagasan akan berkembang dan kokoh jika diayomi orang-orang yang beragama. Ke-empat, kesejahteraan rakyat menurut Syafruddin adalah kemampuan negara menegakkan hukum dengan adil baik di bidang politik, sosial dan ekonomi, berdasarkan bingkai nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal yang ada dalam syariat Islam.

Penelitian di atas sama-sama meneliti tentang agama dan Negara serta tokoh pemuka agama. Akan tetapi penelitian yang sedang peneliti lakukan tentu berbeda. Penelitian di atas meneliti tentang agama dan Negara serta tokoh Syafruddin Prawiranegara dalam pemikirannya. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan meneliti tentang agama, negara dan masyarakat serta peran tokoh KH. Noer Ali dalam pendidikan formal serta non formal, dimana KH. Noer Ali sebagai pahlawan juga sekaligus pendiri lembaga pendidikan formal dan pesantren.

2. Indrawati, dengan judul “*Islam Dan Negara Genealogi Sekularisme Islam di Indonesia 1930-1983*”. Disertasi mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2021.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, masing-masing periode wacana sekularisme kontekstual dengan masalah yang sedang dihadapi, kedua, rangkaian sekularisme Islam bergerak dari wacana nasionalisme, pemisahan agama dan negara, negara kebangsaan, Pancasila sebagai dasar negara, mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, Manipol-Usdek dan Nasakom, dan terakhir, depolitisasi dan deparpolisasi Islam atau desakralisasi partai politik. Sedangkan komunitas epistemik pada tiap periode tersebut adalah nasionalis netral agama, kaum kebangsaan, blok Pancasila, kelompok pro revolusi, dan terakhir pro pembangunan. Kemudian tipologi sekularisme Islam Indonesia dari rentang 1930-

1983 merupakan tipologi sekularisme dengan batas minimum kebebasan institusi agama Islam mengatur institusi politik sangat terbatas (*hard secularism*).

Penelitian di atas sama-sama meneliti tentang agama dan Negara. Akan tetapi penelitian yang sedang peneliti lakukan tentu sangat berbeda. Penelitian di atas meneliti tentang sekularisme kontekstual dengan masalah yang sedang dihadapi. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan meneliti tentang agama, Negara dan masyarakat serta peran tokoh KH. Noer Ali dalam pendidikan formal serta non formal, dimana KH. Noer Ali sebagai pahlawan juga sekaligus pendiri lembaga pendidikan formal dan pesantren.

3. Elvi Wahyudi, dengan judul "*Pembudayaan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Multikultural Pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Gresik*". Disertasi mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Malang (UNISMA). 2020.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa fokus pertama tentang nilai pendidikan agama Islam multikultural yang dikembangkan adalah nilai *al-Ikha'* (persaudaraan), *al-musawah* (persamaan), *al-tasamuh* (toleransi), *al-tasyawur* (musyawarah), *al-ta'awun* (tolong menolong) dan *al-'adalah* (keadilan) serta nilai pendidikan agama Islam multikultural dalam keperawatan adalah nilai altruisme, otonomi, human dignity, integritas, adil, estetika, dan kebenaran. Fokus kedua berkaitan dengan proses pembudayaan nilai pendidikan agama Islam multikultural dilakukan dengan pendidikan kritis melalui belajar dari realitas atau pengalaman, tidak menggurui, dan dialogis dalam pembelajaran. Sedangkan fokus ketiga berkenaan dengan model pembudayaan nilai-nilai multikultural dengan pendekatan sistem, paedagogis/psikologis, historis, dan spiritual yang menghasilkan karakter Islam multikultural kasih sayang, kebersamaan, menghargai perbedaan, rela berkorban, tenggang rasa, tolong-menolong dan nilai Islam multikultural solidaritas dan persaudaraan, kekeluargaan, penghormatan terhadap tatasusila, humaniora, dan toleransi.

Penelitian di atas sama-sama meneliti tentang pendidikan agama. Akan tetapi penelitian yang sedang peneliti lakukan tentu berbeda. Penelitian di atas meneliti tentang nilai pendidikan agama Islam multikultural yang dikembangkan adalah nilai *al-Ikha'* (persaudaraan), *al-musawah* (persamaan), *al-tasamuh* (toleransi), *al-*

tasyawur (musyawarah), al-ta'awun (tolong menolong) dan al-'adalah (keadilan) serta nilai pendidikan agama Islam multikultural. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan meneliti tentang agama, negara dan masyarakat serta peran tokoh KH. Noer Ali dalam pendidikan formal serta non formal, dimana KH. Noer Ali sebagai pahlawan juga sekaligus pendiri lembaga pendidikan formal dan pesantren.

4. Abdul Karim, dengan judul "*KEPEMIMPINAN & MANAJEMEN KIAI DALAM PENDIDIKAN: Studi Kasus pada Pesantren Bendakerep, Gedongan dan Buntet Cirebon*". Disertasi mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perilaku pemimpin pada pondok pesantren dapat memainkan peranan kepemimpinan dan manajerial secara bersamaan, baik secara konsep maupun praktiknya karena diinspirasi oleh nilai, budaya, dan tradisi leluhur. Pola kepemimpinan manajerial di pesantren terdiri dari model spiritual-situasional, berpola kolegiel-informal, bergaya karisma-transformasional dan berperan secara fungsional-interpersona.

Penelitian di atas sama-sama meneliti tentang peran tokoh pemuka agama. Akan tetapi penelitian yang sedang peneliti lakukan tentu berbeda. Penelitian di atas meneliti tentang perilaku pemimpin pada pondok pesantren dapat memainkan peranan kepemimpinan dan manajerial secara bersamaan, baik secara konsep maupun praktiknya karena diinspirasi oleh nilai, budaya, dan tradisi leluhur. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan meneliti tentang agama, negara dan masyarakat serta peran tokoh KH. Noer Ali dalam pendidikan formal serta non formal, dimana KH. Noer Ali sebagai pahlawan juga sekaligus pendiri lembaga pendidikan formal dan pesantren.